



KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: BELANJA MODAL, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAN UKURAN DAERAH

INDONESIA LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE: CAPITAL EXPENDITURE, REGIONAL DEPENDENCE AND REGIONAL SIZE

Amrie Firmansyah¹

Info Artikel

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta,
amriefirmansyah@upnvj.ac.id

Riwayat Artikel :
Diterima 13-05-2023
Direvisi 08-06-2024
Disetujui 28-6-2024
Tersedia online 30-6-2024

**JEL Classification: M40, M41,
M48**

Abstract

Local governments should improve their financial performance to optimize essential services to the community. It is an indication of various parties for the success of local governments in running their organizations. This study examines the effect of capital expenditure, dependence level, and regional size on local government financial performance. The research data derives from a summary report on the realization and balance sheet of the 2021 budget for district/city governments in Indonesia. The research data is taken from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance. Based on purposive sampling, this research sample consisted of 410 observations. This study tested the hypothesis using multiple linear regression analysis for cross-section data. The test results suggest that capital expenditure and dependence level have

a negative effect on local government financial performance. This study also finds that regional size positively affects the local government's financial performance. This research can be employed by the Ministry of Home Affairs related to improving policies on monitoring local infrastructure services by local governments and the implementation of fiscal decentralization in increasing the potential of local government original revenues.

Keywords: *regional assets, regional spending, regional loans, regional original revenue, transfers to the regions*

Abstrak

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikasi berbagai pihak atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, tingkat ketergantungan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data penelitian bersumber dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan neraca tahun 2021 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Data penelitian diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan *purposive sampling*, sampel penelitian ini berjumlah 410 observasi. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk data cross section. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal dan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan oleh

Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelayanan infrastruktur oleh pemerintah daerah dan implementasi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan potensi penerimaan asli pemerintah daerah.

Kata kunci: aset daerah, belanja daerah, pinjaman daerah, pendapatan asli daerah, transfer ke daerah

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan di Indonesia lebih dari 20 tahun bertujuan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pelayanan dasar kepada masyarakat (Nuryani & Firmansyah, 2020). Namun, desentralisasi fiskal tidak selalu ideal dapat dijalankan dengan baik oleh semua pemerintah daerah di Indonesia karena belum maksimalnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat (Hastuti, 2018). Desentralisasi fiskal seyogyanya juga dapat mendorong pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah berkaitan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah (Adinata & Efendi, 2022; Nauw & Riharjo, 2021). Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memiliki sumber-sumber penerimaan asli daerah sehingga pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat (Khikmah, 2014).

Intervensi pemerintah pusat melalui dana transfer ke pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Tujuan desentralisasi fiskal selanjutnya tidak mengakibatkan pemerintah daerah selalu menggantungkan pendanaan pembangunan di daerahnya dengan menggunakan sumber dana transfer pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan memiliki rencana pembangunan yang dapat memberikan potensi daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Prinsip transfer pemerintah kepada pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal berorientasi pada pengelolaan mandiri dari setiap pemerintah daerah termasuk merencanakan sumber-sumber penerimaan asli daerah (Hastuti, 2018). Di sisi lain, pemerintah daerah justru mengalami kekurangan penerimaan asli daerahnya karena beberapa jenis pajak yang cenderung bernilai besar dipungut oleh pemerintah pusat (Hastuti, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan asli daerahnya diluar pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal selayaknya dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum dapat mencapai kondisi tersebut (Hastuti, 2018). Pemerintah daerah dianggap masih belum efisien dalam mengalokasikan anggarannya termasuk kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Hastuti, 2018). Kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaan asli daerah berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, pemerintah daerah akan selalu berupaya untuk tidak selalu tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan oleh semua pihak terkait termasuk Kementerian/Lembaga dan masyarakat.

Implementasi desentralisasi fiskal hingga saat ini masih memiliki beberapa tantangan di antaranya bahwa pemerintah daerah masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan daerah (Elena, 2021). Padahal, 70 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga masih memiliki kendala dalam kemampuan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (Elena, 2021). Selain itu, beberapa pemerintah daerah mengendapkan dananya di perbankan dalam jumlah yang signifikan (Elena, 2021). Seharusnya pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi atau membangun infrastruktur dalam rangka mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih belum optimal dalam merencanakan sumber penerimaan asli daerah dan menghasilkan penerimaan asli daerah. Padahal desentralisasi fiskal yang dijalankan selama lebih dari 20 tahun bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah lebih mandiri dalam mendanai pembangunan daerahnya. Para pemangku kepentingan mengharapkan pemerintah daerah tidak selalu tergantung dengan dana transfer pemerintah pusat dalam mendanai pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam berkontribusi perbaikan kebijakan terkait dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu lebih akuntabel dan transparan dalam mendesain program pembangunan dengan harapan lebih melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan pemerintah daerah dapat mengelola daerah dengan lebih profesional. Salah satu pengelolaan pemerintah daerah tersebut juga berkaitan peningkatan pendapatan asli daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewajiban atas pelayanan dasar kepada masyarakat, namun di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu merancang sumber-sumber penerimaan daerah agar tidak selalu tergantung pada transfer pemerintah pusat di masa mendatang. Oleh karena itu, pengujian atas kinerja keuangan pemerintah daerah perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya telah menguji kinerja pemerintah daerah di antaranya dengan *leverage* (Adinata & Efendi, 2022), ukuran pemerintah daerah (Adinata & Efendi, 2022; Afifah & Adnan, 2022; Maulina et al., 2021), tingkat ketergantungan pemerintah daerah (Adinata & Efendi, 2022; Digidowiseiso et al., 2022; Maulina et al., 2021; Nauw & Riharjo, 2021; Setiani & Ismunawan, 2022), pengangguran (Setiani & Ismunawan, 2022), pendapatan asli daerah (Atmoko & Khairudin, 2022; Digidowiseiso et al., 2022; Maulina et al., 2021; Nauw & Riharjo, 2021; Simamora & Budiwitjaksono, 2022), belanja modal (Atmoko & Khairudin, 2022; Digidowiseiso et al., 2022; Maulina et al., 2021; Nauw & Riharjo, 2021; Ramadana & Bahgia, 2023; Simamora & Budiwitjaksono, 2022), pertumbuhan ekonomi (Setiani & Ismunawan, 2022), dan tingkat kemiskinan (Setiani & Ismunawan, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh belanja modal, tingkat ketergantungan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketiga komponen tersebut erat kaitannya dengan karakteristik pemerintah daerah yang mudah untuk diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Belanja modal erat kaitannya dengan penyediaan infrastruktur dalam suatu daerah. Belanja modal merupakan informasi belanja yang banyak digunakan oleh berbagai pihak (Nuryani & Firmansyah, 2020). Belanja modal

merupakan pos anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset jangka panjang seperti infrastruktur fisik atau aset tidak berwujud jangka panjang (Peraturan Pemerintah RI, 2010). Belanja modal biasanya digunakan untuk mendanai infrastruktur yang dapat diidentifikasi masyarakat secara langsung (Heald, 2012).

Di satu sisi, infrastruktur suatu daerah berkaitan dengan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Di sisi lain, infrastruktur juga mendorong pemerintah daerah dalam menyediakan sumber-sumber potensi penerimaan daerah. Beberapa hasil pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Digdowiseiso et al., 2022; Ramadana & Bahgia, 2023; Simamora & Budiwitjaksono, 2022). Sementara itu, Nauw & Riharjo (2021) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Atmoko & Khairudin (2022) dan Maulina et al. (2021) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya inkonsistensi pengujian sebelumnya mendorong pengujian belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penting untuk dilakukan kembali.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah erat kaitannya dengan intervensi pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer kepada pemerintah daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah masih tergantung pada dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama dalam pendanaan pembangunan di daerah tertentu. Pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam menghasilkan penerimaan asli daerahnya, sehingga pemerintah daerah sangat membutuhkan dana transfer pemerintah pusat sebagai pendapatan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Adinata & Efendi, 2022; Digdowiseiso et al., 2022). Sementara itu, Maulina et al. (2021) dan Setiani & Ismunawan (2022) menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Nauw & Riharjo (2021) menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Adanya perbedaan hasil pengujian sebelumnya mengakibatkan perlu dilakukan pengujian kembali pengaruh tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran daerah merupakan indikasi terkait dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitasnya (Firmansyah et al., 2022). Selain itu, ukuran daerah berkaitan dengan kepemilikan aset pemerintah daerah penyelenggaraan pemerintahannya (Nuryani & Firmansyah, 2020). Pemerintah daerah dengan ukuran besar dianggap lebih mampu dalam mengelola sumber dayanya dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lebih kecil (Firmansyah et al., 2022). Pemerintah daerah dapat lebih optimal dapat menghasilkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya apabila didukung dengan kepemilikan aset yang besar. Afifah & Adnan (2022) menemukan bahwa ukuran daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Adinata & Efendi (2022) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maulina et al. (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat perbedaan hasil pengujian ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada beberapa penelitian sebelumnya mengakibatkan pengujian hubungan keduanya perlu dilakukan kembali.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar menggunakan data pemerintah kabupaten/kota dalam suatu wilayah atau propinsi tertentu. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih mencerminkan kondisi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, penelitian-penelitian lainnya mengulas kinerja keuangan pemerintah daerah secara deskriptif dengan menggunakan satu pemerintah daerah dengan data pada periode tertentu (Hafizi & Amalia, 2022; Lada et al., 2021; Purwanti & Noviyanti, 2022; Putri & Munandar, 2021; Yulinchton et al., 2022). Selain itu, penelitian ini menggunakan data terbaru pemerintah daerah pada saat penelitian ini dilakukan yaitu data tahun 2022, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi terkini terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi dalam melengkapi literatur terkait dengan pengujian kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan terkait dengan ulasan kinerja keuangan pemerintah daerah selanjutnya baik dalam konteks Indonesia atau negara lainnya dengan karakteristik desentralisasi yang sejenis. Kontribusi lainnya adalah penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan perbaikan kebijakan monitoring pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya melalui belanja infrastruktur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan teori pemangku kepentingan suatu organisasi perlu melibatkan berbagai kepentingan dalam menjalankan organisasinya (Hill & Jones, 1992). Organisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan berusaha lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya kepada publik (Estutik & Firmansyah, 2019). Suatu organisasi mampu bertahan dalam menjalankan operasinya karena pimpinan organisasi mempertimbangkan kebutuhan banyak pihak (Fasita et al., 2022). Salah satu yang menjadi perhatian banyak pihak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal banyak berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dalam satu daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah RI, 2010). Belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI, 2010). Di satu sisi, berbagai pemangku kepentingan mengharapkan pemerintah daerah untuk melaksanakan belanja modal yang berkualitas dan mengutamakan kebutuhan masyarakat sebagai organisasi penyedia layanan publik (Nuryani & Firmansyah, 2020).

Di satu sisi, belanja modal yang menghasilkan infrastruktur pada suatu daerah untuk penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Di sisi lain, infrastruktur juga mendorong pemerintah daerah dalam menyediakan sumber-sumber potensi penerimaan asli daerah. Belanja modal merupakan informasi belanja yang banyak digunakan oleh berbagai pihak (Nuryani & Firmansyah, 2020). Belanja modal merupakan pos anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset jangka panjang seperti infrastruktur fisik atau aset tidak berwujud jangka

panjang (Peraturan Pemerintah RI, 2010). Belanja modal biasanya digunakan untuk mendanai infrastruktur yang dapat diidentifikasi masyarakat secara langsung (Heald, 2012).

Digdowniseiso et al. (2022), Ramadana & Bahgia (2023), dan Simamora & Budiwitjacksono (2022) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Terkait dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperoleh sumber penerimaan asli daerah, bukan hanya menggantungkan penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Salah satu indikator keberhasilan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan menghasilkan penerimaan asli daerahnya karena kemampuan ini berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₁: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Para pemangku kepentingan mengharapkan bahwa suatu organisasi dapat menjalankan operasinya secara transparan (Freeman, 1984). Selain itu, organisasi perlu melakukan evaluasi atas dampak keputusan yang diambilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Fasita et al., 2022). Desentralisasi fiskal yang dijalankan di Indonesia lebih dari 20 tahun seharusnya mendorong pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi tergantung dengan dana transfer pemerintah pusat dalam mengelola organisasinya. Pemerintah daerah perlu bertanggung jawab pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam menghasilkan sumber-sumber asli daerah. Pemerintah daerah dianggap masih tergantung pada dana transfer pemerintah pusat apabila pemerintah daerah tetap mengharapkan sumber utama penerimaan daerahnya berasal dari transfer pemerintah pusat dalam mendanai pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah yang masih tergantung pada dana transfer pemerintah pusat masih memiliki keterbatasan dalam menghasilkan penerimaan asli daerahnya padahal desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan lebih dari 20 tahun.

Adinata & Efendi (2022) dan Digdowniseiso et al. (2022) menemukan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang masih tergantung pada intervensi dana transfer pemerintah daerah dianggap kurang memiliki perencanaan pembangunan terkait dengan program kegiatan yang dapat menghasilkan sumber penerimaan asli daerah. Adanya kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan operasi dan menyediakan layanan dasar kepada masyarakat mengakibatkan pemerintah daerah tetap mengharapkan dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan daerah.

H₂: Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa suatu organisasi perlu menggabungkan nilai-nilai etika dan kebajikan dalam menjalankan operasinya (Freeman, 1984). Pengambilan keputusan pimpinan suatu organisasi harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan dampak yang ditimbulkan pada setiap pemangku kepentingan dalam proses tata kelola organisasi (Freeman, 1984). Organisasi yang semakin besar akan memiliki pemangku kepentingan yang lebih kompleks. Akibatnya, kinerja keuangan suatu organisasi yang lebih besar berdampak pada informasi yang berguna bagi pemangku kepentingannya.

Ukuran pemerintah daerah yang lebih besar menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki sumber daya yang lebih besar (Firmansyah et al., 2022). Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki nilai aset yang besar (Nuryani & Firmansyah, 2020). Pemerintah daerah dengan ukuran besar dianggap lebih mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lebih kecil (Firmansyah et al., 2022).

Adinata & Efendi (2022) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menghasilkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya apabila didukung dengan kepemilikan aset yang besar. Adanya tekanan dari pemangku kepentingan bahwa pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar mengakibatkan pemerintah daerah tersebut memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan kinerja keuangan yang lebih optimal.

H₃: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari website www.djpk.kemenkeu.go.id. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Penelitian

| Kriteria | Jumlah |
|---|--------|
| Jumlah pemerintah daerah pada situs www.djpk.go.id per Mei 2023 | 542 |
| Total pemerintah propinsi | (38) |
| Jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memiliki data tidak lengkap | (94) |
| Jumlah sampel | 410 |

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Proksi kinerja keuangan pemerintah daerah mengikuti proksi yang digunakan oleh Adinata & Efendi (2022) dan Nauw & Riharjo (2021) yaitu:

$$FP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Transfer Provinsi} + \text{Pinjaman Daerah}}$$

Belanja modal, tingkat ketergantungan, dan ukuran daerah merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Proksi belanja modal pada penelitian ini mengikuti proksi yang digunakan oleh Atmoko & Khairudin (2022) yaitu:

$$CE = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}}$$

Tingkat ketergantungan daerah mengikuti proksi yang digunakan oleh Adinata & Efendi (2022) dan Setiani & Ismunawan (2022).

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Realisasi dana perimbangan}}{\text{Realisasi Total pendapatan daerah}}$$

Proksi ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan yaitu logaritma natural total aset per tanggal 31 Desember 2021, mengikuti proksi yang digunakan oleh Adinata & Efendi (2022). Penggunaan logaritma natural total aset pada proksi ukuran pemerintah daerah karena terdapat total aset setiap pemerintah daerah bervariasi yang tinggi, sehingga untuk meminimalisir perbedaan tersebut digunakan logaritma natural dari total asetnya (Mustika et al., 2019).

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk data *cross section*. Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FP_i = \beta_0 + \beta_1 CE_i + \beta_3 DEP_i + \beta_4 SIZE_i + \varepsilon_i$$

Di mana:

FP_i = kinerja keuangan pemerintah daerah i

CE_i = belanja modal pemerintah daerah i

DEP_i = tingkat ketergantungan pemerintah daerah i

SIZE_i = ukuran pemerintah daerah i

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ringkasan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Ringkasan Statistik Deskriptif

| | Mean | Med. | Std. Dev. | Min. | Max. | Obs |
|------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| FP | 0.180 | 0.116 | 0.198 | 0.005 | 2.019 | 410 |
| CE | 0.161 | 0.149 | 0.058 | 0.047 | 0.376 | 410 |
| DEP | 0.826 | 0.856 | 0.110 | 0.320 | 0.995 | 410 |
| SIZE | 28.753 | 28.629 | 0.637 | 27.399 | 31.481 | 410 |

FP= kinerja keuangan pemerintah daerah; CE= belanja modal; DEP= tingkat ketergantungan; SIZE= ukuran daerah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja pemerintah daerah di Indonesia masih rendah. Pemerintah daerah di Indonesia dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya masih belum optimal, karena masih rendahnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Terdapat pemerintah daerah yang sudah berhasil memperoleh kinerja keuangan yang besar dengan jumlah yang sedikit. Belanja modal pemerintah daerah di Indonesia secara umum masih rendah dibandingkan dengan total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan prioritas pengadaan infrastruktur pemerintah daerah masih belum dilakukan secara optimal. Selain itu, pemerintah daerah di Indonesia lebih banyak bergantung dari dana transfer pemerintah pusat sebagai pendapatan utama pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki ukuran perusahaan yang bervariasi namun secara rata-rata cukup tinggi. Berikut merupakan uji korelasi antar setiap variabel independennya (multikolinearitas).

Tabel 3 Koefisien Korelasi Antar Variabel Dependen

| Var. | CE | DEP | SIZE |
|------|----------|-----------|-----------|
| CE | 1.000000 | 0.139044 | 0.045771 |
| DEP | 0.139044 | 1.000000 | -0.630179 |
| SIZE | 0.045771 | -0.630179 | 1.000000 |

CE= belanja modal; DEP= tingkat ketergantungan;
SIZE= ukuran daerah

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel independennya di bawah 0.8, sehingga variabel independen tidak mengalami multikolinearitas (Ghozali, 2016). Selanjutnya, ringkasan hasil uji hipotesis yang telah melewati uji normalitas dan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

| Variabel | Coeff. | t-Stat. | Prob. | |
|---------------------|---------|---------|-------|-----|
| C | -0.562 | -4.025 | 0.000 | *** |
| CE | -0.078 | -2.420 | 0.008 | *** |
| DEP | -1.376 | -58.161 | 0.000 | *** |
| SIZE | 0.066 | 14.291 | 0.000 | *** |
| R ² | 0.962 | | | |
| Adj. R ² | 0.961 | | | |
| F-stat. | 1646.46 | | | |
| Prob(F-stat.) | 0.000 | | | |

***signifikan pada tingkat 1%

CE= belanja modal; DEP= tingkat ketergantungan; SIZE= ukuran daerah.

Pengujian hipotesis menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan temuan Nauw & Riharjo (2021), namun tidak sejalan dengan temuan Atmoko & Khairudin (2022), Digdowiseiso et al. (2022), Maulina et al. (2021), Ramadana & Bahgia (2023), dan Simamora & Budiwitjaksono (2022). Berdasarkan teori pemangku kepentingan suatu organisasi termasuk pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai kepentingan dalam menjalankan organisasinya (Hill & Jones, 1992). Keterlibatan pemangku kepentingan dalam organisasi selain untuk dapat menyajikan informasi yang lebih transparan juga berkaitan dengan keberlangsungan organisasi di masa depan. Pemerintah daerah merupakan organisasi publik yang perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan atas keputusan yang diambil termasuk dalam perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu daerah. Salah satu informasi yang dijadikan sebagai acuan terkait dengan aktivitas pemerintah daerah adalah belanja modal karena belanja modal banyak berkaitan dengan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah daerah dalam satu daerah.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah menghasilkan infrastruktur di suatu daerah baik untuk penyediaan layanan dasar kepada masyarakat maupun untuk mendorong pemerintah daerah dalam menyediakan sumber-sumber potensi penerimaan asli daerah. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, pemerintah daerah di Indonesia lebih banyak menyediakan infrastruktur dari belanja modalnya untuk layanan dasar masyarakat. Pada umumnya, pemerintah daerah masih menggantungkan penerimaan daerahnya dari transfer ke daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Walaupun desentralisasi fiskal telah berjalan lebih dari 20 tahun, namun tidak mengakibatkan pemerintah daerah di Indonesia untuk lebih mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Adanya tekanan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dasar kepada masyarakat mengakibatkan pemerintah daerah tidak memfokuskan belanja modalnya untuk merencanakan dan mendapatkan sumber penerimaan asli daerahnya. Pemerintah daerah di Indonesia diduga lebih menjalankan tanggung jawab kepada pemangku kepentingannya dalam penyediaan

layanan dasar dibandingkan dengan peningkatan kinerja keuangan dalam memperoleh sumber penerimaan asli daerah.

Pengujian hipotesis menemukan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan temuan Adinata & Efendi (2022) dan Digdowiseiso et al. (2022), namun tidak sejalan dengan temuan Maulina et al. (2021), Nauw & Riharjo (2021) dan Setiani & Ismunawan (2022). Para pemangku kepentingan mengharapkan bahwa suatu organisasi dalam menjalankan operasinya secara transparan (Freeman, 1984). Penyelenggaraan desentralisasi fiskal di Indonesia mengharapkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi terlalu tergantung dengan transfer pemerintah daerah dalam menjalankan operasinya. Informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah diharapkan lebih transparan kepada pemangku kepentingan termasuk informasi atas dana transfer pemerintah pusat.

Pada awal periode desentralisasi fiskal dijalankan di Indonesia, sangat wajar apabila pemerintah daerah masih menggantungkan sumber penerimaan daerahnya dari pemerintah pusat. Namun, konsekuensi dari desentralisasi fiskal tersebut mendorong pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya di tahun-tahun selanjutnya. Desentralisasi fiskal yang sudah dijalankan di Indonesia lebih dari 20 tahun seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk lebih siap dalam merencanakan dan menghasilkan sumber penerimaan asli daerahnya.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih tergantung pada dana transfer pemerintah pusat dibandingkan dengan inisiasi pemerintah daerah dalam menghasilkan penerimaan asli daerahnya. Desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan lebih dari 20 tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah diduga masih tetap memiliki keterbatasan dalam menghasilkan penerimaan asli daerahnya. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan penelitian Hastuti (2018) yang menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal masih belum optimal. Pemerintah daerah pada umumnya kurang memiliki perencanaan pembangunan terkait dengan program dan kegiatan yang dapat menghasilkan sumber penerimaan asli daerah. Adanya kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar dianggap sebagai alasan utama tetap menggantungkan transfer pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian ini sejalan dengan Adinata & Efendi (2022), namun tidak sejalan dengan temuan Afifah & Adnan (2022) dan Maulina et al. (2021). Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa suatu organisasi perlu menggabungkan nilai-nilai etika dan kebajikan dalam menjalankan operasinya (Freeman, 1984). Selain itu, dalam teori pemangku kepentingan, pengambilan keputusan pimpinan suatu organisasi harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan dampak yang ditimbulkan pada setiap pemangku kepentingan dalam proses tata kelola organisasi (Freeman, 1984). Sejalan dengan teori pemangku kepentingan, pemerintah daerah yang berukuran besar akan mempertimbangkan semua pemangku kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan pemangku kepentingan dianggap penting oleh pemerintah daerah yang berukuran lebih besar dalam pengambilan kebijakan yang selanjutnya berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemangku kepentingan menganggap bahwa pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar dapat lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Pemanfaatan sumber daya tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar diduga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi keinginan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kondisi tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuktikan atas pencapaian kinerja keuangan yang optimal kepada pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar diduga juga lebih memiliki program dan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi potensi sumber penerimaan asli daerah.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, belanja modal dan tingkat ketergantungan menurunkan kinerja pemerintah daerah. Belanja modal yang dihasilkan oleh pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk infrastruktur yang tidak menghasilkan potensi pendapatan asli daerah. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagian besar masih didugakan untuk menyediakan infrastruktur operasi pemerintah daerah maupun infrastruktur yang disediakan untuk layanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintah daerah diduga masih tetap mengharapkan transfer dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utama dalam APBDnya. Sementara itu, ukuran perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang berukuran lebih besar diduga memiliki program dan perencanaan kegiatan yang mendukung untuk menghasilkan sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan mengharapkan pemerintah daerah dengan ukuran besar harus mampu menggunakan sumber daya internalnya untuk dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu tahun periode pelaporan yaitu tahun 2021 yang merupakan data terakhir yang dapat diakses dari situs DJPK. Selain itu, terdapat pemerintah daerah yang tidak memiliki informasi data neraca yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga kondisi ini mengurangi jumlah sampel penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data seluruh pemerintah kabupaten/kota dengan horison waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Berdasarkan temuan penelitian ini, Kementerian Dalam Negeri harus meningkatkan kebijakan terkait dengan monitoring dan pengaturan atas kinerja pemerintah daerah khususnya penggunaan data transfer dan belanja modal pemerintah daerah yang erat kaitannya dengan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1-14. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4477>
- Afifah, S. I., & Adnan, A. (2022). Pengaruh varian anggaran, ukuran pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 485-498.

- <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21670>
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295>
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150>
- Elena, M. (2021). *Sri Mulyani sebut implementasi desentralisasi fiskal masih hadapi 4 tantangan*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210913/10/1441498/sri-mulyani-sebut-implementasi-desentralisasi-fiskal-masih-hadapi-4-tantangan>
- Estutik, R. S., & Firmansyah, A. (2019). Profesi akuntan syariah untuk mendukung perekonomian syariah. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 6(2), 1091–1100. <https://doi.org/10.32722/acc.v6i2.2456>
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connection, tax avoidance: does corporate governance have a role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313>
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas laporan keuangan di Indonesia: transparansi informasi keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: a stakeholder approach*. Boston : Pitman.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 116–130. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799. Desentralisasi fiskal dan stabilitas politi. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Heald, D. (2012). Why is transparency about public expenditure so elusive? *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 30–49. <https://doi.org/10.1177/0020852311429931>
- Hill, C. W., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder-agency theory. *Journal of Management Studies*, 29(2), 131–154.
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep value for money. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 3(1), 1–25. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10496>
- Lada, A., Rosmiati, R., & Samadara, S. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit*, 6(2), 12–21. <https://doi.org/10.32511/jaka.v2i1.261>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Mustika, U. N., Rustam, M., & Azazi, A. (2019). Analisis pengaruh ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap profitabilitas serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Equator Journal Of Management And Entrepreneurship*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.26418/ejme.v7i1.29134>
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset*

- Akuntansi*, 10(6), 1-17.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4056/>
- Nuryani, N., & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local government websites : evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(2), 145-155.
<https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.82.145.155>
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2), 1-12.
<https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2296-2313. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1684>
- Ramadana, S. W., & Bahgia, S. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Setiani, I., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh pengangguran pertumbuhan ekonomi kemiskinan dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 261-276.
<https://www.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/2201>
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410-415.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah: studi kasus di Kabupaten Tegal periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303.
<https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>